

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

## Fraksi PAN Minta Akses e-Budgeting DKI

### Gambir, Warta Kota

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta meminta agar anggota dewan diberikan akses e-budgeting penganggaran DKI Jakarta. Partai bergambar matahari putih itu menyinggung, anggota dewan memiliki hak untuk memonitor anggaran tersebut sesuai aturan dari Kementerian Dalam Negeri dan UU yang ada.

"Semua anggota dewan itu punya akses untuk memonitor, bukan mengubah atau menginterupsi (anggaran) loh ya, hanya akses melihat saja," ujar Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto.

Hal itu diungkapkan Bambang saat interupsi rapat paripurna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada Kamis (20/7/2023). Rapat itu dihadiri Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Yang lucu, untuk DKI nggak pernah diberikan. Sementara Pemprov yang lain, itu sudah jalan. Sudah lama 5-6 tahun yang lalu," kata pria yang menjadi anggota Komisi A DPRD DKI ini.

Menurut dia, e-budgeting memang dibuat di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kemudian setelah diterapkan, Bambang tak mengetahui alasan pemberian akses kepada DPRD DKI Jakarta itu tidak diberikan.

"Padahal, tiap tahun kalau Komisi A rapat dengan Bappeda dan Diskominfo, mereka selalu menjanjikan akses, tapi nggak pernah diberikan," ucapnya.

Seingat dia, akses tidak diberikan ketika dia dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta pada 2019 lalu.

Namun dia tak mengetahui, koleganya di Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta justru bisa mengakses website itu saat mengungkap pengadaan lem aibon dan pulpen dengan anggaran fantastis.

"Saya nggak tahu mereka dapat dari mana, sebenarnya semua data anggaran kan dokumen publik, harusnya publik juga boleh lihat," imbuhnya.

Bambang menduga ada faktor kesengajaan dari Pemprov DKI Jakarta yang tidak mau memberi akses e-budgeting. Apalagi, kata dia, Komisi A terkenal kritis dengan Diskominfo dan Bappeda ketika pembahasan anggaran.

"Komisi A galak soal masalah ginian, karena memang kebetulan Diskominfo dan Bappeda mitra kerja kami, dan kami hampir setiap tahun ngotot untuk dibuka," paparnya.

Sementara itu Heru menganggap permintaan akses tersebut sebagai bentuk pengawasan dari anggota dewan.

"Bukan diprotes, diusulkan oleh Pak Bambang, masukan soal melihat e-planning dan e-budgeting," ujar Heru usai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (20/7/2023).

Heru menilai, usulan Bambang itu sangat wajar. Apalagi anggota dewan kerap menyapa konstituen lewat kegiatan sosialisasi perda (sosper) dan reses.

"Itu wajar saja supaya hasil reses bisa dimonitor dari awal masuk, apa tidak," kata pria yang juga menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI ini.

"Nanti kami bicarakan dengan Pak Sekda dan Bappeda. E-planning dan e-budgeting di BPKD ya," imbuhnya. (faf)